

STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN MAROS 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAROS**

STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAROS TAHUN 2014

ISSN	:
No. Publikasi	: 73082.1501
Katalog BPS	: 1103001.7308
Ukuran Buku	: 15 x 21 Cm
Jumlah Halaman	: ix + 61 Halaman
Naskah/Editor	: Seksi Statistik Sosial
Gambar Kulit	: Seksi IPDS
Diterbitkan Oleh	: BPS Kabupaten Maros

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



KATA PENGANTAR

Publikasi ***Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros Tahun 2014*** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Maros antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Lingkungan serta Taraf dan Pola Konsumsi.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Maros, Oktober 2015
**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Maros**

Marwanto, S.Si., M.Si
NIP. 19640201 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Katalog Publikasi	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Sumber Data.....	2
1.5 Penjelasan Teknis.....	3
BAB II KEPENDUDUKAN	
2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Sex Rasio.....	8
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	11
2.3 Angka Beban Ketergantungan.....	14
BAB III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	
3.1 Usia Perkawinan Pertama.....	17
3.2 Status Perkawinan.....	19
3.3 Fertilitas.....	21
3.4 Keluarga Berencana.....	23
BAB IV PENDIDIKAN	
4.1 Angka Melek Huruf (AMH).....	27
4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	29

BAB V KESEHATAN

5.1	Angka Kesakitan (Morbidity).....	34
5.2	Penolong Persalinan.....	36
5.3	Air Susu Ibu (ASI).....	38

BAB VI KESEHATAN

6.1	Tingkat Partisipasi Ketenagakerjaan.....	41
6.2	Lapangan Usaha.....	43
6.3	Status Pekerjaan.....	45

BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

7.1	Kualitas Rumah Tinggal.....	47
7.2	Fasilitas Rumah Tinggal.....	50
7.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	55

BAB VIII TARAF DAN POLA KONSUMSI

8.1	Pengeluaran Rumah Tangga.....	57
8.2	Pola Konsumsi.....	59
8.3	Distribusi Penduduk Golongan Pengeluaran.....	60

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	
2.1 Kabupaten Maros Tahun 2011-2014.....	4
Grafik Distribusi Penduduk Kabupaten Maros Tahun	
2.2 2014.....	13
Grafik Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke atas yang	
3.1 Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan	
Pertama, Tahun 2012-2014.....	18
Grafik Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas	
3.2 Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin,	
Tahun 2014.....	21
Grafik Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke atas	
3.3 di Kabupaten Maros Tahun 2014 Menurut	
Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup.....	22
Grafik Persentase Wanita Usia 15 - 49 Tahun yang	
3.4 Berstatus Kawin Menurut Penggunaan	
Alat/Cara KB, Tahun 2014.....	23
Grafik Persentase Wanita Usia 15 - 49 Tahun yang	
3.5 Berstatus Kawin Menurut Jenis Alat/Cara KB	
yang Dipakai, Tahun 2014.....	25
Grafik Angka Melek Huruf (%) Menurut Jenis Kelamin,	
4.1 Tahun 2014.....	28
Grafik Angka Partisipasi Sekolah (%) Menurut	
4.2 Kelompok Umur, Tahun 2014.....	30

Grafik	Angka Partisipasi Sekolah (%) Menurut Jenis	
4.3	Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2014.....	30
Grafik	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas	
4.4	yang Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin	
	dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2014.....	31
Grafik	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas	
4.5	Menurut Status Pendidikan Tertinggi yang	
	Ditamatkan, Tahun 2014.....	32
Grafik	Angka Morbiditas Penduduk Menurut Jenis	
5.1	Keluhan yang Dialami, Tahun 2014.....	35
Grafik	Persentase Balita Menurut Penolong	
5.2	Persalinan Pertama, Tahun 2014.....	36
Grafik	Persentase Balita Menurut Penolong	
5.3	Persalinan Terakhir, Tahun 2014.....	38
Grafik	Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI	
5.4	Menurut Lamanya Diberi ASI dan Jenis	
	Kelamin, Tahun 2014.....	39
Grafik	TPAK (%) Kabupaten Maros Menurut Jenis	
6.1	Kelamin, Tahun 2013 dan 2014.....	42
Grafik	TPT (%) Kabupaten Maros Menurut Jenis	
6.2	Kelamin, Tahun 2013 dan 2014	42
Grafik	Distribusi Tenaga Kerja (%) Menurut Lapangan	
6.3	Usaha, Tahun 2013 dan 2014.....	44
Grafik	Distribusi Tenaga Kerja (%) Menurut Status	
6.2	Pekerjaan Utama, Tahun 2013 dan 2014.....	45

Grafik	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas	
7.1	Lantai Rumah.....	47
Grafik	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap	
7.2	Terluas.....	48
Grafik	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis	
7.3	Dinding Terluas.....	49
Grafik	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis	
7.4	Lantai Terluas.....	50
Grafik	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas	
7.5	Tempat Buang Air Besar.....	53
Grafik	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat	
7.6	Pembuangan Tinja.....	53
Grafik	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber	
7.7	Penerangan.....	54
Grafik	Persentase Rumah Tangga Menurut	
7.8	Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal.....	55
Grafik	Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk	
8.1	Kabupaten Maros, Tahun 2013 dan 2014.....	58
Grafik	Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Maros,	
8.2	Tahun 2013 dan 2014.....	59
Grafik	Persentase Penduduk Kabupaten Maros	
8.3	Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita, Tahun 2013 dan 2014	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis 2.1 Kelamin Tahun 2011-2014.....	10
Tabel Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) Menurut Kecamatan 2.2 Tahun 2011-2014.....	12
Tabel Komposisi Penduduk dan Angka Beban 2.3 Ketergantungan Tahun 2011-2014.....	14
Tabel Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Menurut 3.1 Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Tahun 2012- 2014	19
Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan dan 7.2 Sumber Air.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu tingkat kesejahteraan masyarakat pada periode waktu tertentu perlu dievaluasi dengan melihat perubahan berbagai indikator sosial yang ada. Perubahan tersebut akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada periode tersebut. Hasil evaluasi pembangunan juga dapat dijadikan faktor koreksi dalam rencana pembangunan ke depan agar sasarannya lebih tepat dan berguna.

Menyadari betapa perlunya data dan informasi dalam evaluasi pembangunan, maka BPS Kabupaten Maros berusaha untuk menyediakan data statistik yang berkesinambungan guna menopang perencanaan pembangunan baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

1.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan publikasi ini yaitu untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai perkembangan demografi dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Maros secara umum. Gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan atau perencanaan pembangunan untuk masa yang akan datang.

1.3. RUANG LINGKUP

Publikasi *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros Tahun 2014* menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Kabupaten Maros dan perkembangannya antar waktu. Publikasi ini menyajikan indikator-indikator input, proses dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut.

Dimensi Kesejahteraan Rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat tidak hanya dapat terlihat dari suatu aspek tertentu. Dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari beberapa aspek yang spesifik, yaitu aspek Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Lingkungan serta Taraf dan Pola Konsumsi. Dalam pengertian yang luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan statistik atau indikator yang mampu untuk mengukur kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*).

1.4. SUMBER DATA

Sumber data utama dalam publikasi ini merupakan data primer yang dikumpulkan dan diolah sendiri BPS baik BPS RI, BPS Provinsi Sulawesi Selatan maupun BPS Kabupaten Maros seperti hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi tahunan ini telah dilakukan melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok Susenas yang diadakan setiap tahun. Dengan demikian publikasi ini mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif *up to date*.

1.5. PENJELASAN TEKNIS

Penduduk menurut kelompok umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok interval 5 tahunan yang dimulai dari usia 0 tahun.

Kepadatan Penduduk adalah rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi satuan luas.

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah ukuran rata-rata kecepatan penambahan penduduk per tahun

Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk pada usia yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk yang termasuk usia produktif (15 – 64 tahun).

Usia Perkawinan Pertama menunjukkan usia saat seseorang melangsungkan upacara perkawinan yang pertama.

Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis.

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis apabila dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) persentase jumlah penduduk menurut jenjang usia tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada jenjang usia tersebut.

Masih Bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Bukan Angkatan Kerja adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun bukan pengangguran, seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau tua dan cacat.

Bekerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur (mulai tahun 2010 termasuk non formal).

Mengurus Rumah Tangga adalah penduduk 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat bekerja.

Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

Konsumsi Rumah Tangga adalah pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Kelompok makanan mencakup pengeluaran konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan kelompok bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pengeluaran rata rata perkapita sebulan adalah rata rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

BAB II KEPENDUDUKAN

Pembangunan dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Pembangunan memerlukan berbagai sumber daya antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang paling menentukan keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yaitu penduduk, yang selain menjadi pelaku pembangunan juga merupakan objek dari pembangunan itu sendiri.

Semakin banyak jumlah penduduk idealnya semakin banyak pelaku pembangunan dan diharapkan pula akan memberikan input pembangunan yang bernilai lebih. Namun di sisi lain, penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan dan papan serta kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah

lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas. Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

2.1. JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN DAN SEX RASIO

Salah satu masalah klasik kependudukan dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2014 berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 tercatat sebanyak 335.596 jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 3.800 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2013 yang mencapai 331.796 jiwa. Sedangkan jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010 yaitu 319.002 jiwa, telah mengalami peningkatan sekitar 5,2 %. Dengan kata lain selama kurun waktu empat tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Maros telah mengalami penambahan penduduk sebesar 15.493 jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, pada tahun 2014 tercatat sebesar 1,15 % atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan Kabupaten Maros sebesar 1,25 % dan mengalami penurunan menjadi 1,20 % pada tahun 2012 dan 1,16 % pada tahun 2013. Hal ini dapat menunjukkan adanya keberhasilan kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Maros.

Grafik 2.1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Maros Tahun 2011-2014



Tabel 2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	324.097	1,25	95
2012	327.998	1,20	95
2013	331.796	1,16	96
2014	335.596	1,15	96

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin Kabupaten Maros pada tahun 2014 sebesar 96. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 96 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Maros lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

2.2. PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk dalam setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator kependudukan yang umum digunakan karena mampu mencerminkan tingkat pemerataan penduduk dalam suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat kepadatan penduduk dapat membawa dampak positif maupun negatif. Kepadatan yang sudah pada titik jenuh, mungkin akan lebih banyak memberi dampak negatif, akibat terjadinya ketimpangan sumber daya. Permasalahan sosial dan kriminal kemungkinan akan meningkat jika tidak segera dilakukan keseimbangan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti fasilitas sosial dan ekonomi. Pemerataan dan keseimbangan dapat juga dilakukan dengan relokasi penduduk dalam bentuk migrasi sehingga terjadi kondisi ideal dan seimbang antara penduduk dan ketersediaan sumber daya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2014 sebesar 207 jiwa/km². Ini berarti dalam setiap km² terdapat 207 jiwa penduduk. Kecamatan Turikale dengan kepadatan 1.455 jiwa/km² merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan Kecamatan Mallawa merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya yaitu 46 jiwa/km².

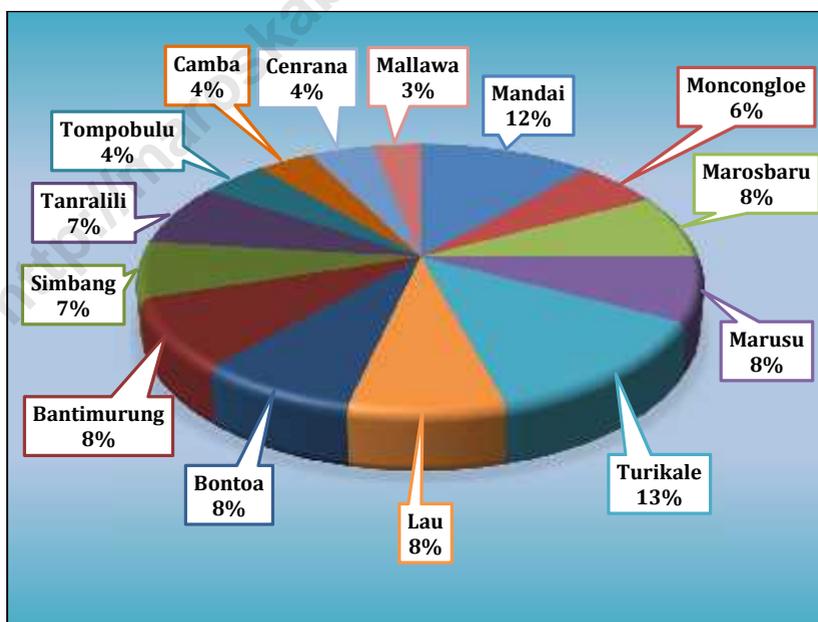
Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) Menurut Kecamatan Tahun 2011-2014

Kecamatan	2011	2012	2013	2014
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Mandai	740	754	773	792
011 Moncongloe	375	382	392	401
020 Marosbaru	457	466	475	483
021 Marusu	477	483	488	493
022 Turikale	1.403	1.422	1.439	1.455
023 Lau	335	342	349	355
030 Bontoa	284	284	285	285
040 Bantimurung	162	163	163	164
041 Simbang	213	214	215	216
050 Tanralili	276	279	281	282
051 Tompobulu	50	50	51	51
060 Camba	86	87	87	87
061 Cenrana	76	77	78	79
070 Mallawa	45	46	46	46
Maros	200	203	205	207

Gejala umum yang terjadi adalah bahwa kepadatan penduduk cenderung tinggi di daerah-daerah perkotaan. Ketersediaan fasilitas sosial yang lebih lengkap dan beragam serta bervariasinya lapangan pekerjaan merupakan daya tarik tersendiri yang menggiring penduduk untuk melakukan perpindahan ke daerah kota.

Penduduk yang tidak merata persebarannya perlu mendapat perhatian berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu diharapkan adanya persebaran penduduk yang lebih merata dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya.

Grafik 2.2. Distribusi Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2014



2.3. ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi. Dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Tabel 2.3. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2011-2014

Tahun	Komposisi Penduduk (%)			Angka Beban Ketergantungan (%)
	< 15 tahun	15 - 64 tahun	> 64 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	30,81	64,4	4,79	55
2012	30,46	64,68	4,86	55
2013	30,11	64,95	4,94	54
2014	29,78	65,2	5,02	53

Selama periode 2011-2014 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2011 dan 2012 angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Maros sebesar 55 %. Angka ini menurun menjadi 54 % pada tahun 2013. Pada tahun 2014, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 53 %. Artinya secara rata-rata setiap 100 penduduk produktif masih menanggung sekitar 53 penduduk tidak produktif atau dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif akan ditanggung oleh sekitar 2 orang usia produktif. Namun hal ini dengan asumsi bahwa setiap orang usia produktif betul-betul dapat produktif. Jika tidak, tentu akan lebih berat lagi karena beban tanggungan usia produktif yang juga harus menanggung usia produktif lainnya. Bahkan usia produktif yang tidak dapat diberdayakan untuk betul-betul produktif secara ekonomi (pengangguran) akan menimbulkan masalah yang cukup serius dalam kehidupan sosial.

Struktur umur penduduk Kabupaten Maros masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun), di mana pada tahun 2011 terdapat sekitar 64,4 % dan terus meningkat hingga mencapai sekitar 65,2 % di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Maros menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sedangkan menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0 – 14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2011, terdapat sekitar 30,81 % penduduk usia muda yang terus menurun hingga mencapai sekitar 29,78 % di tahun 2014.

Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 4,79 % pada tahun 2010 menjadi 5,02 % di tahun 2014.

<http://maroskab.bps.go.id>

BAB III

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

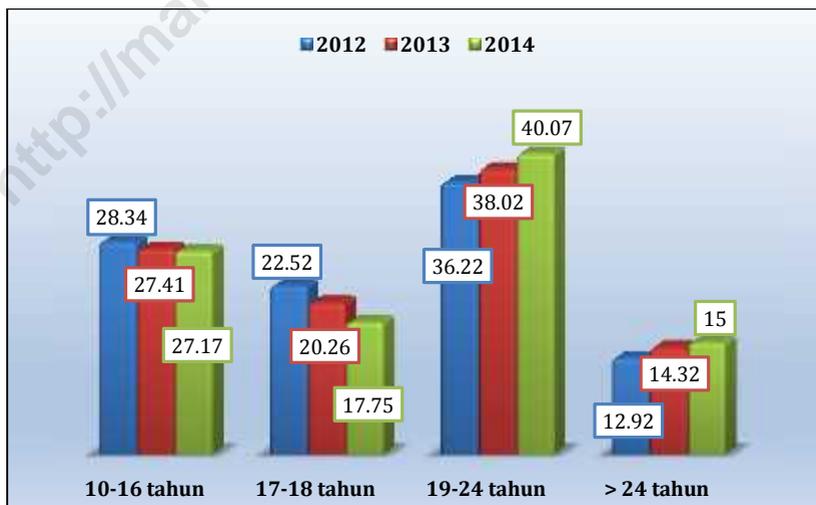
Perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan yang paling utama adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk secara alami, yaitu menekan dan mengendalikan tingkat kelahiran (fertilitas). Pengendalian jumlah penduduk melalui fertilitas dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB). Program ini erat kaitannya dengan harapan pemerintah tentang lahirnya generasi yang baru yang lebih handal dan berkualitas untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Harapan ini bisa tercapai jika himbuan untuk menunda usia perkawinan pertama dan membatasi jumlah kelahiran bisa dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia sehingga berpengaruh positif terhadap percepatan pembangunan di berbagai bidang. Program KB tidak hanya mengurangi angka kelahiran tetapi juga menciptakan keluarga sejahtera dan semakin berkualitas.

3.1. USIA PERKAWINAN PERTAMA

Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, memungkinkan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka semakin panjang masa reproduksinya.

Berdasarkan hasil Susenas 2014, persentase wanita di Kabupaten Maros yang berusia 10 – 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 27,17 % atau mengalami penurunan dari 27,41 % di tahun sebelumnya dan 28,34 % di tahun 2012. Hal yang sama juga terjadi pada wanita usia 17 – 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama. Pada usia tersebut, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak atau remaja yang belum siap untuk membina sebuah keluarga. Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 19 – 24 tahun dengan persentasenya yang terus meningkat dari 36,22 % di tahun 2012 menjadi 38,02 % di tahun 2013 dan 40,07 % di tahun 2014.

Grafik 3.1. Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, Tahun 2012-2014



3.2. STATUS PERKAWINAN

Status perawinan secara demografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka fertilitas, khususnya status perkawinan pada penduduk perempuan. Selain itu, status perkawinan juga dapat mencerminkan kestabilan status penduduk dalam membentuk rumah tangga.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Tahun 2012-2014

Tahun	Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	Laki-laki	40,82	56,27	1,24	1,67	100
	Perempuan	35,35	52,96	1,95	9,74	100
2013	Laki-laki	39,8	56,87	1,54	1,79	100
	Perempuan	32,47	53,96	3,2	10,37	100
2014	Laki-laki	37,49	58,27	1,71	2,53	100
	Perempuan	30,94	55,41	3,27	10,38	100

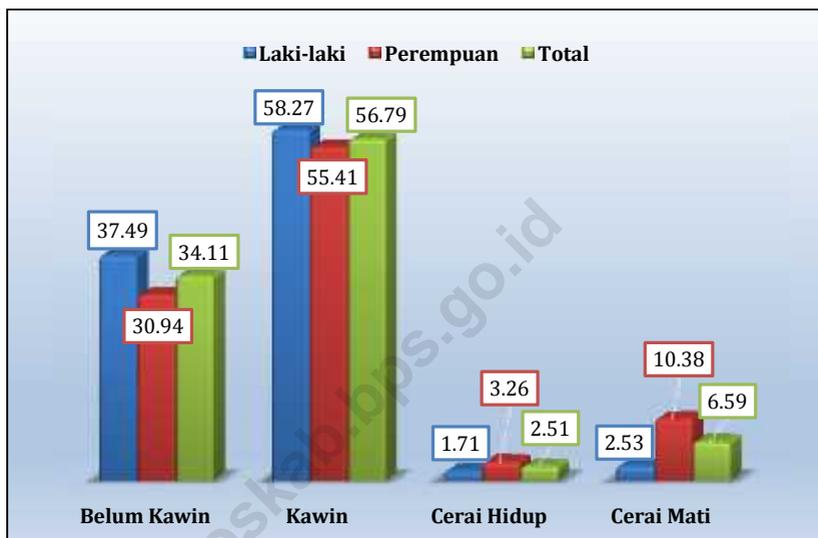
Persentase jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan yang berstatus belum kawin menurun dari 40,82 % dan 35,35 % pada tahun 2012 menjadi 37,49 % dan 30,94 % di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Maros memilih untuk menyegerakan menikah dan membina rumah tangga untuk kehidupan yang lebih baik.

Tali perkawinan dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya utuh dan dapat dipertahankan karena seringkali terjadi konflik yang kadang sulit diatasi oleh pasangan suami istri. Konflik yang terjadi sering kali berujung pada perceraian, sehingga terjadi perubahan status perkawinan dari status kawin menjadi cerai hidup. Untuk melihat kestabilan ketahanan rumah tangga, dapat dicermati dari persentase jumlah penduduk berstatus cerai hidup. Semakin tinggi persentasenya, maka kualitas ketahanan rumah tangga relatif makin rendah.

Persentase jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang berstatus cerai hidup kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 mencapai 1,71 % untuk laki-laki dan 2,53 % untuk perempuan, meningkat dari 1,23 % untuk laki-laki dan 1,95 % untuk perempuan di tahun 2013.

Jika dilihat pada status cerai mati, terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2014, persentase jumlah penduduk perempuan yang berstatus cerai mati sekitar 10,38 %, jauh di atas persentase jumlah penduduk laki-laki yang berstatus cerai mati yang hanya sekitar 2,53 %. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan lebih dapat bertahan dengan status jandanya (janda cerai mati) dibanding laki-laki. Ketika laki-laki ditinggal mati oleh pasangannya, kemungkinan untuk menikah lagi akan lebih besar. Hal ini pula yang mungkin menyebabkan lebih tingginya persentase jumlah penduduk laki-laki berstatus kawin dibanding perempuan.

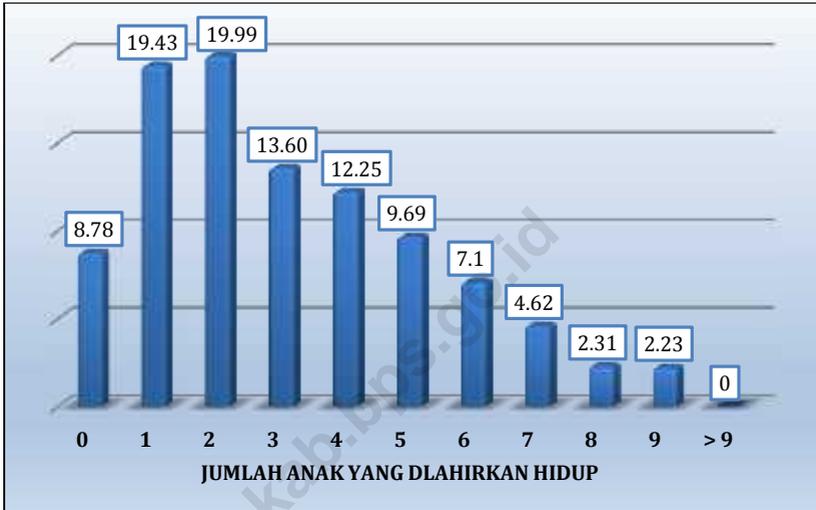
Grafik 3.2. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Tahun 2014



3.3 FERTILITAS

Anak dalam suatu rumah tangga turut menentukan tingkat kesejahteraan keluarga karena semakin banyak anggota keluarga dalam suatu rumah tangga maka semakin banyak pula perhatian dan kebutuhan yang perlu disediakan. Dalam slogannya, program KB menekankan bahwa dua anak cukup. Dengan demikian jumlah anak merupakan salah satu indikator keberhasilan program KB.

Grafik 3.3. Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke atas di Kabupaten Maros Tahun 2014 Menurut Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup

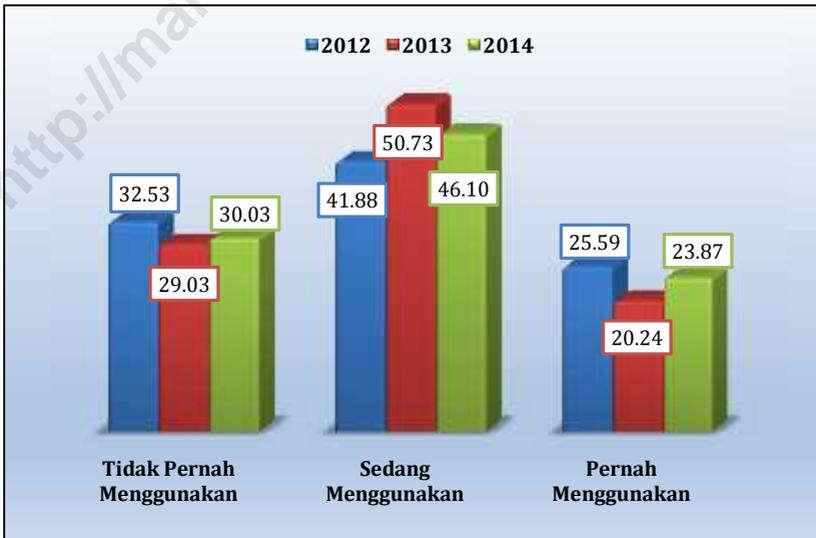


Dari sejumlah penduduk wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin, 8,78 % belum pernah melahirkan dan tidak ada yang pernah melahirkan lebih dari 9 anak. Sedangkan persentase tertinggi berada pada kelompok wanita yang melahirkan 2 anak yaitu sekitar 19,99 %, kemudian diikuti oleh kelompok wanita yang telah melahirkan 1 anak yaitu sekitar 19,43 % dan 3 anak yaitu sekitar 13,60 %. Hal ini sejalan dengan slogan yang diangkat dalam program KB yang menekankan bahwa dua anak cukup. Meskipun demikian program KB belum sepenuhnya dikatakan berhasil karena masih adanya wanita-wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin dan telah melahirkan lebih dari 3 anak, bahkan ada yang mencapai 9 anak.

3.4. KELUARGA BERENCANA

Program KB merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan berbagai jenis alat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini, mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan implant. Dengan cakupan akseptor KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan dengan lebih baik.

Grafik 3.4. Persentase Wanita Usia 15 – 49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2014

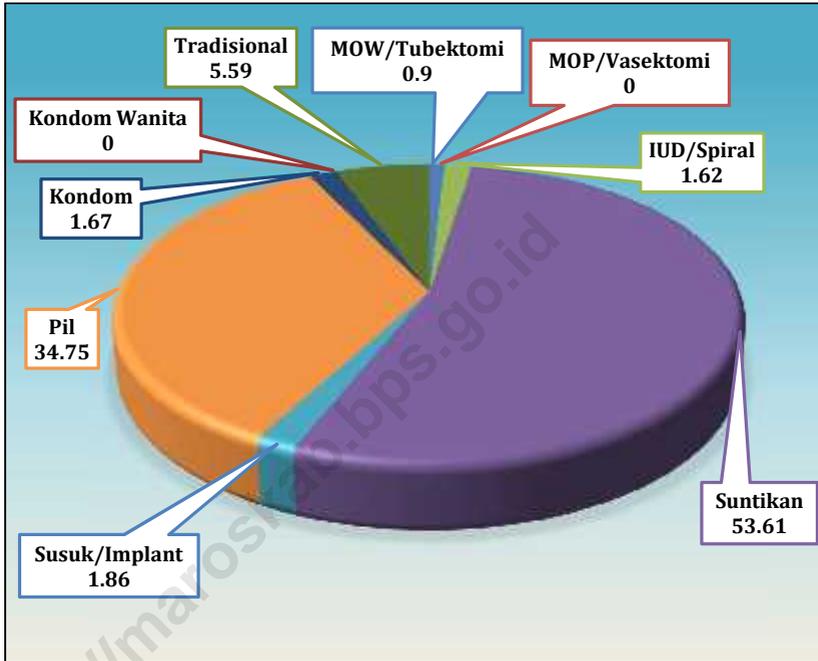


Persentase wanita usia subur (15 – 49 tahun) yang berstatus kawin yang sedang menggunakan KB sudah mencapai 41,88 % di tahun 2012, meningkat menjadi 50,73 % di tahun 2013 dan kembali turun menjadi 46,10 % di tahun 2014. Angka-angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tidak pernah menggunakan maupun yang pernah menggunakan tapi tidak sedang menggunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wanita usia subur di Kabupaten Maros telah menyadari akan pentingnya program KB demi mencapai keluarga yang sehat dan sejahtera.

Berdasarkan masa kerjanya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, harga dan cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien dan minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2014, dari seluruh akseptor KB aktif di Kabupaten Maros, 53,61 % memilih menggunakan suntikan KB dan 34,75 % memilih mengkonsumsi pil KB. Sedangkan untuk MOP/vasektomi dan kondom wanita, belum ada yang menggunakannya.

Grafik 3.5. Persentase Wanita Usia 15 – 49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Jenis Alat/Cara KB yang Dipakai, Tahun 2014



BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar dan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penataan tata kelola, akuntabilitas citra publik dan peningkatan pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 disebutkan dalam sasaran pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf, meningkatnya

persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan serta berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

4.1. ANGKA MELEK HURUF (AMH)

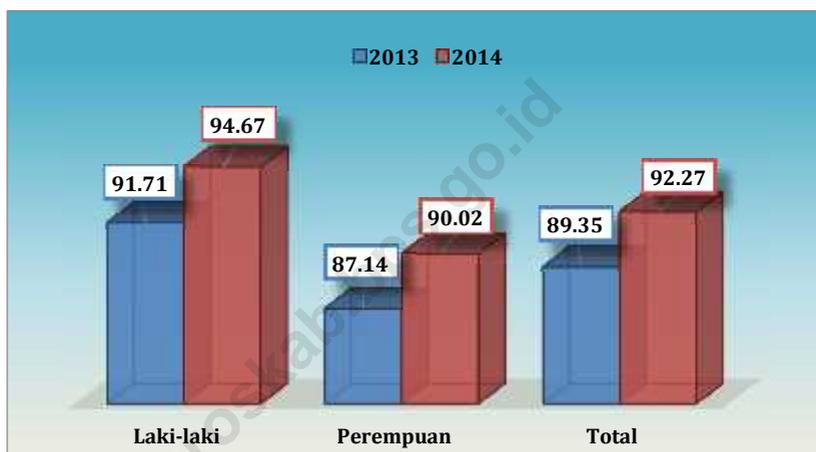
Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya.

Sesorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin ataupun huruf lainnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin tinggi angka melek huruf menunjukkan semakin rendahnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin.

Selain menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur

keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, AMH juga berperan sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

Grafik 4.1. Angka Melek Huruf (%) Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2014



AMH pada tahun 2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan AMH Kabupaten Maros pada tahun 2014 sekitar 92,27 % meningkat dari 89,35 % di tahun 2013. Peningkatan AMH ini menunjukkan bahwa angka buta huruf masyarakat semakin menurun dan semakin meningkatnya sumber daya manusia dari sisi pendidikan, meskipun minimal hanya dapat membaca dan menulis. Hal ini juga dapat mencerminkan keberhasilan program pemberantasan buta aksara/huruf yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Meskipun program pemberantasan buta aksara telah

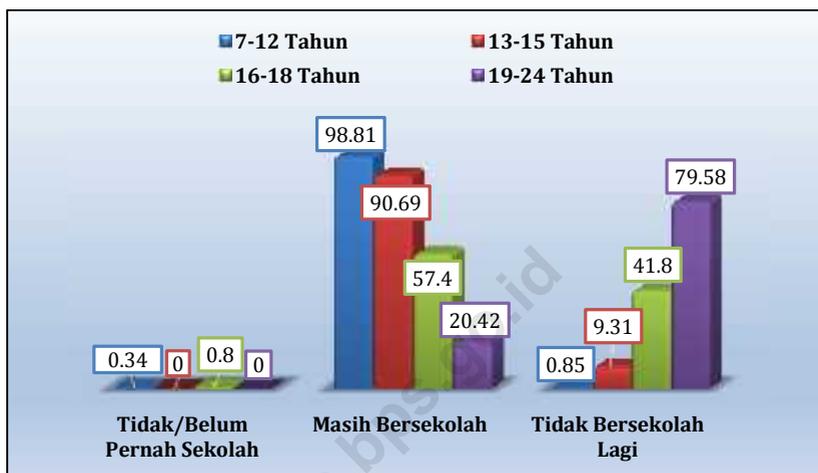
menunjukkan adanya keberhasilan, program ini harus terus dilakukan sehingga angka buta huruf masyarakat dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya.

4.2. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

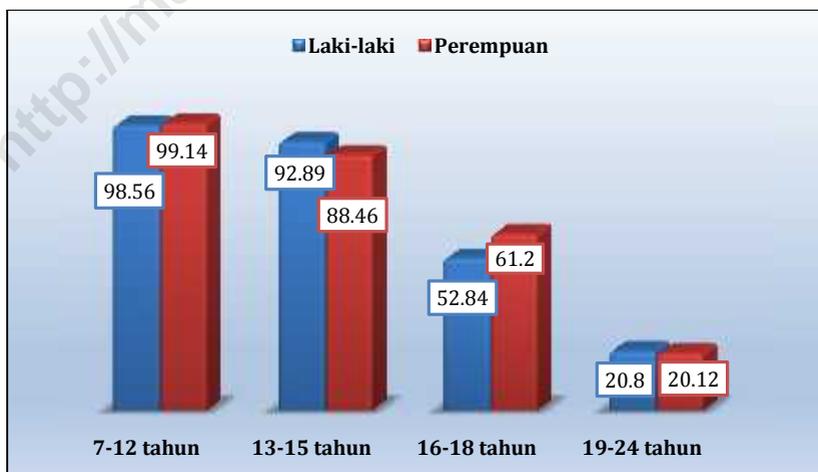
APS merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Atau dengan kata lain APS digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. APS diperoleh dari persentase jumlah penduduk menurut jenjang usia tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada jenjang usia tersebut.

Pada tahun 2014 di Kabupaten Maros, APS tertinggi terdapat pada kelompok usia 7 – 12 tahun yaitu sekitar 98,81 %. Ini berarti bahwa masih terdapat sekitar 1,19 % penduduk berusia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah. Penduduk berusia 19 – 24 tahun hanya sekitar 20,42 % yang masih bersekolah, sedangkan 79,58 % sisanya tidak bersekolah lagi. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tidak terjadi kecenderungan tertentu. Penduduk perempuan yang berusia 7 – 12 tahun dan berusia 16 – 18 tahun memiliki partisipasi sekolah yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, sedangkan hal yang sebaliknya terjadi pada penduduk berusia 13 – 15 tahun dan berusia 19 – 24 tahun.

Grafik 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (%) Menurut Kelompok Umur, Tahun 2014

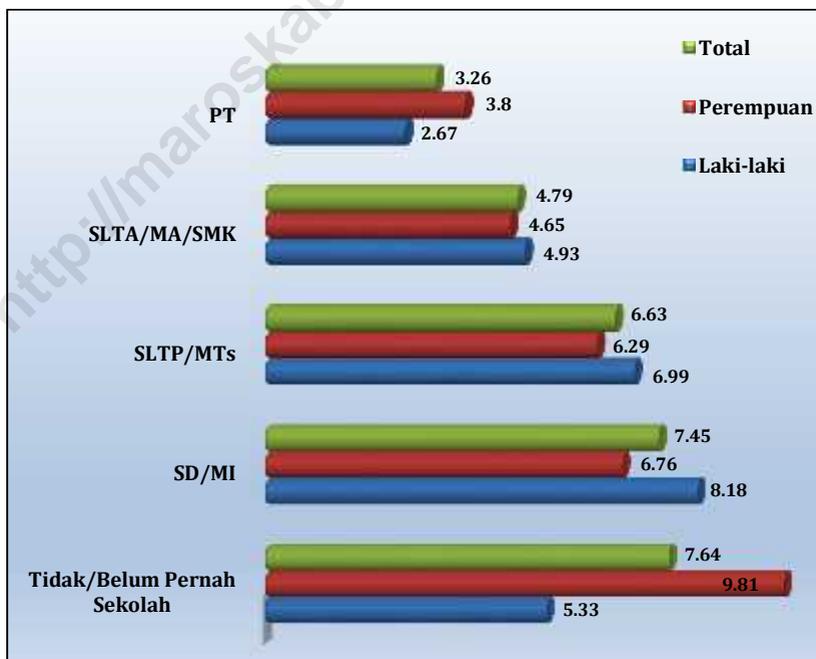


Grafik 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (%) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2014

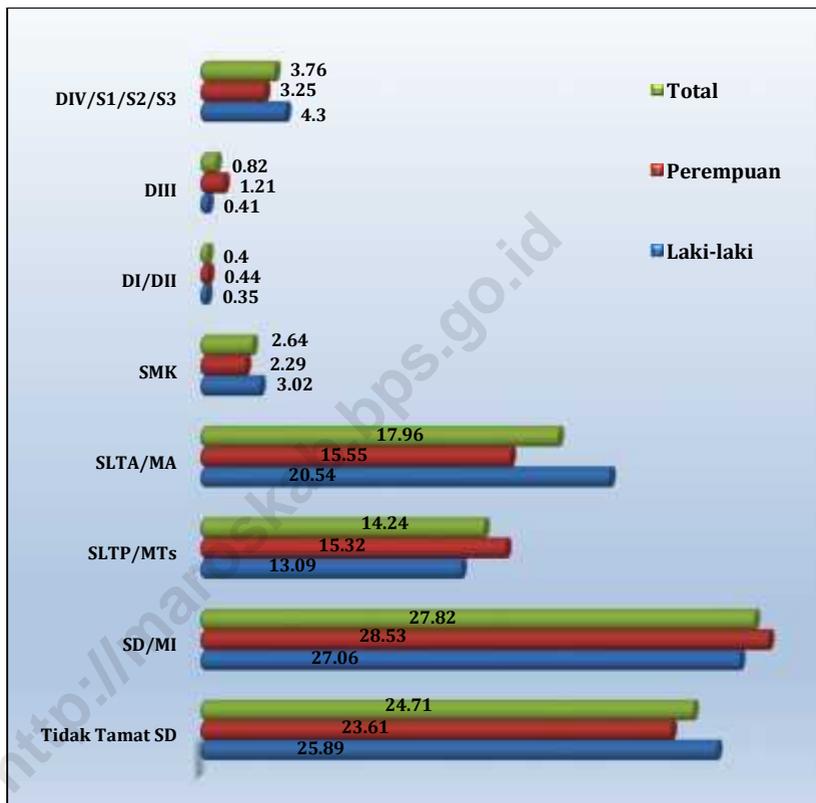


Jika dilihat dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih bersekolah, tingkat pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi (PT) masing-masing memiliki persentase sekitar 7,45 %, 6,63 %, 4,79 dan 3,26 %, sedangkan 7,64 % tidak/belum pernah sekolah dan sisanya 70,24 % sudah tidak bersekolah lagi. Perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pada keadaan tidak bersekolah lagi yang bukan disebabkan karena tamat sekolah dengan mencari alternatif terbaik agar pendidikan tidak terhenti di tengah jalan.

Grafik 4.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2014



Grafik 4.5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2014



Untuk pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 24,71 % penduduk usia 10 tahun ke atas telah tamat SD/MI, 27,82 % telah tamat SLTP/MTs, 17,96 % telah tamat SLTA/MA, 2,64 % telah tamat SMK, 0,4 % telah tamat DI/DII, 0,82 % telah tamat DIII dan 3,76 % telah tamat DIV/S1/S2/S3, sedangkan 24,71 % tidak tamat SD dan sisanya 7,64 % tidak/belum pernah sekolah.

BAB V KESEHATAN

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan kondisi fisik yang sehat maka manusia dapat melakukan aktivitas secara optimal. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah menggalakkan berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sasaran utamanya meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah serta meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, beberapa indikator kesehatan di antaranya keluhan kesehatan penolong persalinan dan pemberian ASI.

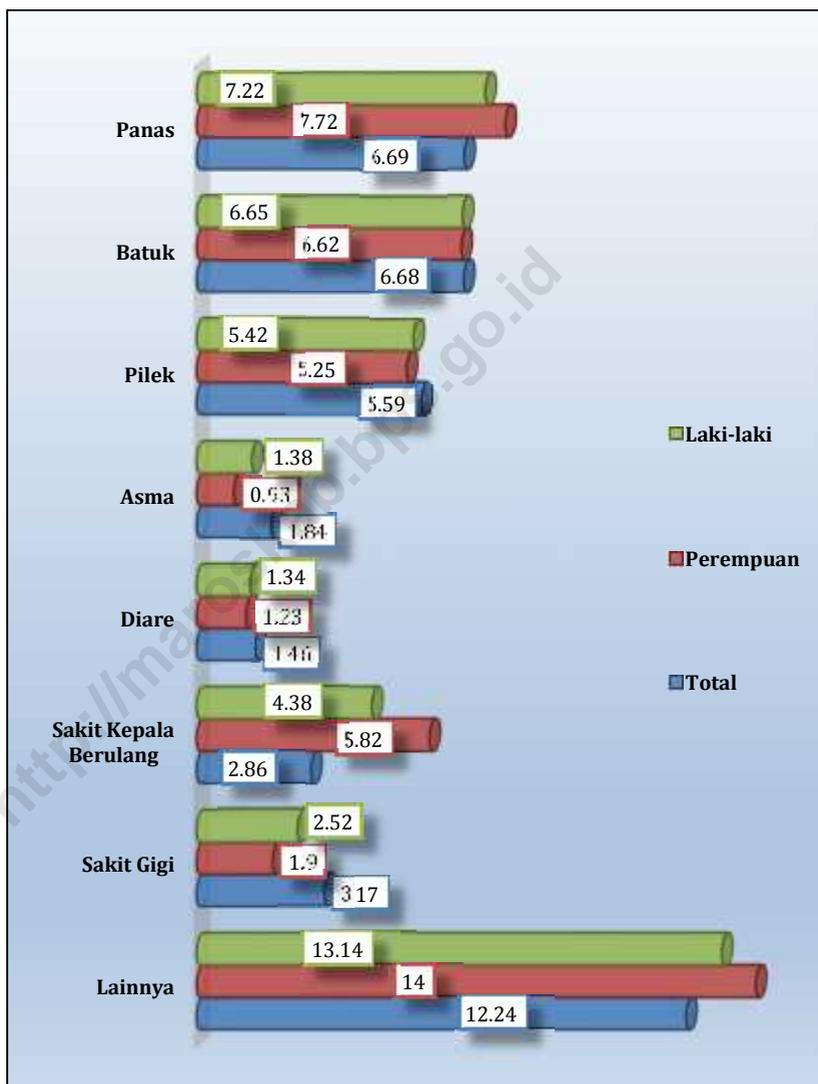
5.1. ANGKA KESAKITAN (MORBIDITAS)

Derajat Kesehatan penduduk dapat dilihat dari angka kesakitan (morbidity) yang menunjukkan ada tidaknya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Keluhan tersebut mengindikasikan adanya suatu penyakit tertentu.

Morbidity adalah proporsi penduduk yang mengeluh sakit pada selang waktu tertentu. Keluhan yang dimaksud mencakup panas, batuk, pilek, asma/sesak napas, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya. Semakin tinggi angka morbidity menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2014 adalah panas, batuk dan pilek yang masing-masing memiliki angka morbidity 7,22 %, 6,65 % dan 5,42 %. Sakit kepala berulang dan sakit gigi juga sering dikeluhkan dengan angka morbidity 4,38 % dan 2,52 %, sedangkan diare/buang-buang air dan asma dengan angka morbidity masing-masing 1,34 % dan 1,38 merupakan yang paling jarang dikeluhkan oleh masyarakat.

Grafik 5.1. Angka Morbiditas Penduduk Menurut Jenis Keluhan yang Dialami, Tahun 2014

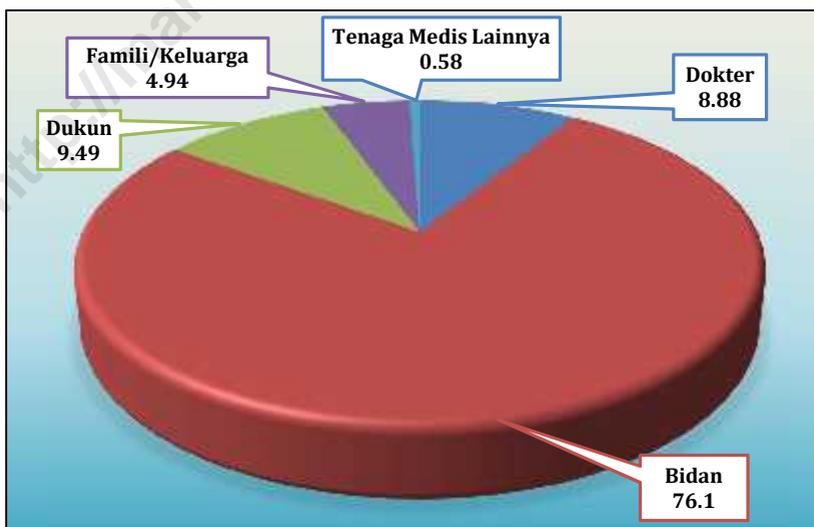


5.2. PENOLONG PERSALINAN

Kesehatan balita, selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu semasa kehamilan, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti proses kelahiran/persalinan serta kondisi lingkungan tempat tinggal. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubngannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik dibandingkan dengan proses yang ditolong dukun atau lainnya. Besaran ini dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran.

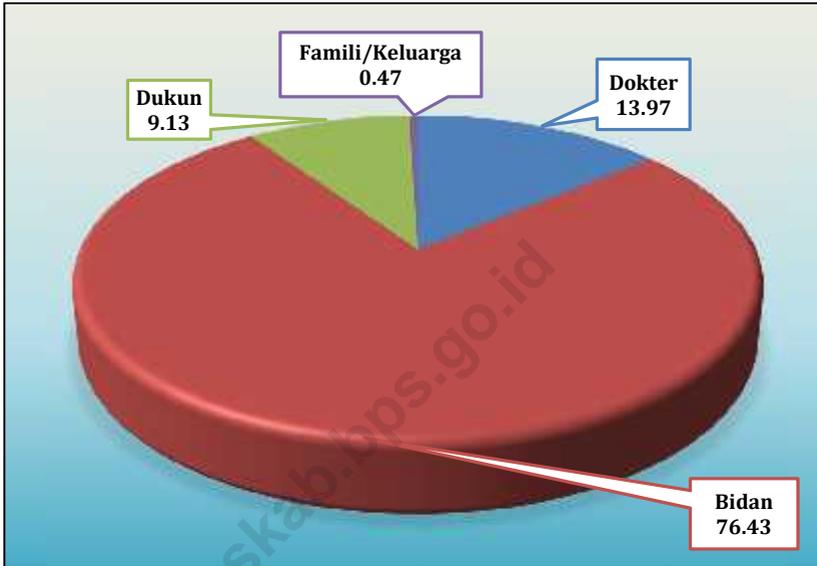
Grafik 5.2. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Pertama, Tahun 2014



Sekitar 85,56 % proses persalinan bayi di Kabupaten Maros pada tahun 2014 ditolong oleh tenaga kesehatan. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak digunakan jasanya oleh masyarakat untuk proses persalinan dengan persentase 76,1 %, diikuti oleh 8,88 % jasa tenaga dokter dan 0,58 % jasa tenaga kesehatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar untuk mempercayakan proses persalinan kepada tenaga kesehatan demi keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi. Meskipun demikian, masih terdapat 14,4 % proses persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan seperti dukun dan keluarga/famili. Perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut terlebih bagi mereka dengan alasan akses fasilitas maupun biaya demi mengurangi resiko kematian ibu dan bayi.

Proses persalinan tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan, terutama persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan. Tenaga non kesehatan memiliki keterbatasan baik dari segi teknik maupun peralatan medis. Baik keterbatasan pada tenaga penolong maupun masalah yang terjadi pada ibu dan calon bayi, terkadang mengharuskan proses persalinan dialihkan ke tenaga penolong persalinan yang lain atau yang biasa diistilahkan dengan penolong persalinan terakhir. Perubahan yang menonjol terjadi pada persentase balita dengan penolong persalinan terakhir oleh keluarga/famili yaitu menurun menjadi 0,47 %. Sejalan dengan penurunan tersebut, terjadi kenaikan pada persentase balita dengan penolong persalinan terakhir oleh dokter yaitu 13,97 %.

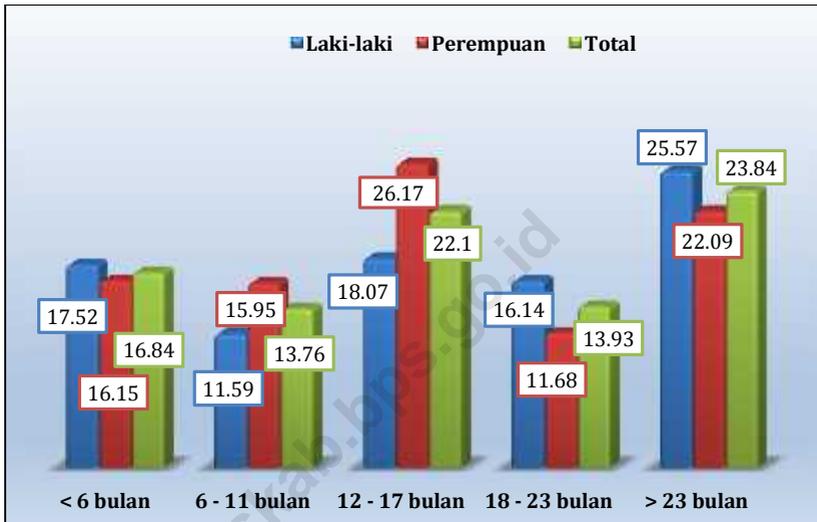
Grafik 5.3. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Terakhir, Tahun 2014



5.3. AIR SUSU IBU (ASI)

ASI merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain mengandung nilai gizi yang tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian ASI yaitu dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak. Dianjurkan seorang ibu dapat menyusui anaknya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI cenderung akan membuat daya tahan tubuh bayi semakin baik.

Grafik 5.4. Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Diberi ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2014



Rata-rata lama pemberian ASI pada balita di Kabupaten Maros cukup tinggi. Pada tahun 2014 balita yang disusui selama 24 bulan ke atas memiliki persentase tertinggi yaitu sekitar 23,84 % dari total keseluruhan balita. Sedangkan untuk persentase balita yang disusui selama 6 – 11 bulan, 12 – 17 bulan dan 18 – 23 bulan masing-masing sekitar 13,76 %, 22,1 % dan 13,93 %. Namun, sangat disayangkan karena masih ada sekitar 16,84 % balita yang hanya disusui kurang dari 6 bulan, bahkan 11,10 % balita tidak pernah disusui. Kenyataan yang cukup memprihatinkan bahwa masih ada sebagian ibu yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemberian ASI pada bayi dengan menggunakan susu formula untuk menggantikan ASI.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Sayangnya besarnya penawaran tersebut tidak disertai dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar luas yaitu pengangguran.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja.

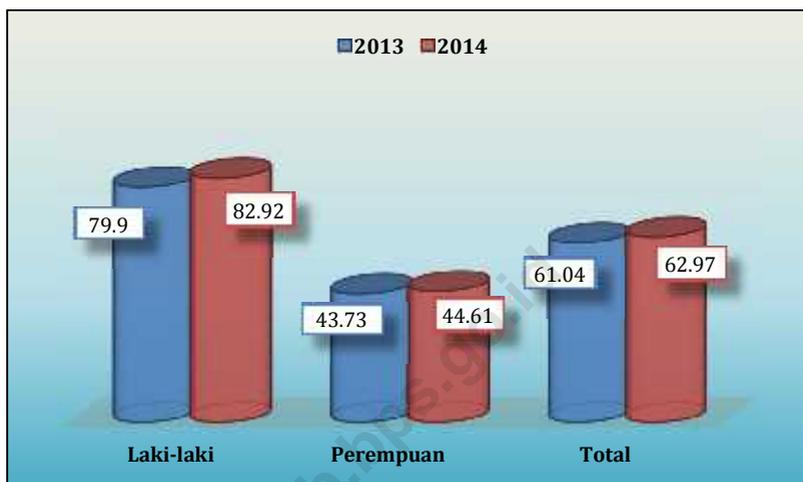
Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan dan jumlah jam kerja.

6.1. TINGKAT PARTISIPASI KETENAGAKERJAAN

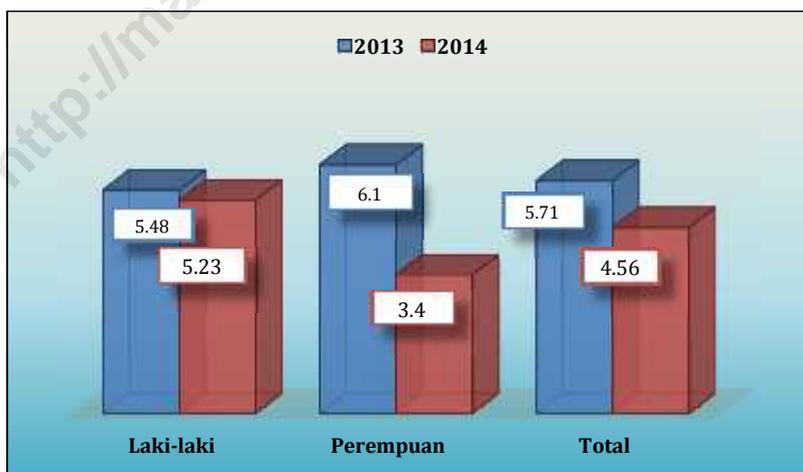
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja yang dihitung dari rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Sedangkan TPT merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa putus asa dan mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai kerja termasuk dalam kategori pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPAK Kabupaten Maros pada Agustus 2014 mengalami kenaikan yakni dari 61,04 % menjadi 62,97 %. Namun demikian, kenaikan maupun penurunan TPAK tidak secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan suatu wilayah. Jika berdasarkan jenis kelamin pun terjadi kenaikan baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan. TPAK laki-laki selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini sesuai dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga lebih aktif dalam kegiatan ekonomi.

Grafik 6.1. TPAK (%) Kabupaten Maros Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013 dan 2014



Grafik 6.2. TPT (%) Kabupaten Maros Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013 dan 2014



Pada periode Agustus 2013 ke 2014, TPT Kabupaten Maros mengalami penurunan sebesar 1,15 % yaitu dari 5,71 % menjadi 4,56 %. Demikian pula jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki dan TPT perempuan mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa selama setahun terakhir dari setiap 100 angkatan kerja yang ada terdapat 4 atau 5 orang pengangguran. Nilai TPT yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa adanya peningkatan daya serap tenaga kerja, atau dengan kata lain laju kesempatan kerja cukup dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

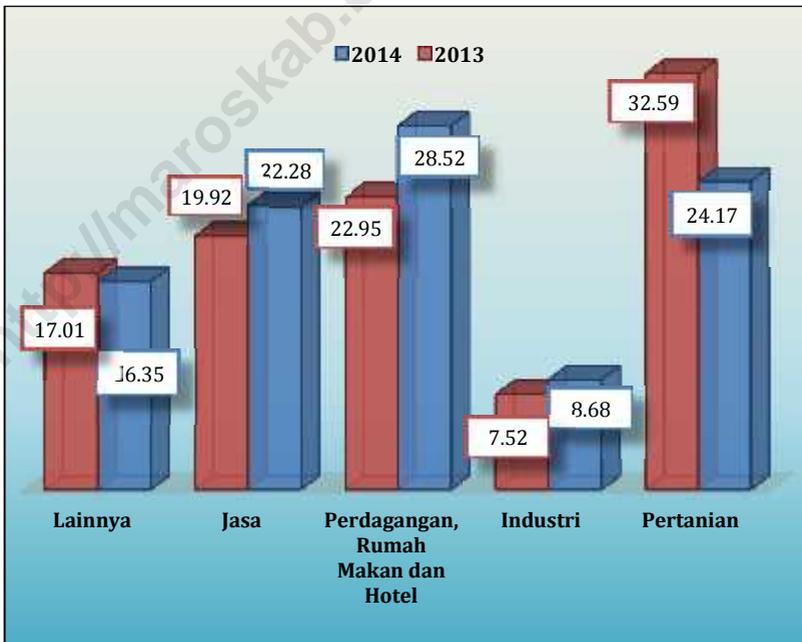
6.2. LAPANGAN USAHA

Distribusi pekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi pekerja dibagi menjadi lima lapangan usaha utama yaitu :

- a. Pertanian yang terdiri dari Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan;
- b. Industri yang terdiri dari Pertambangan, Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air, serta Konstruksi;
- c. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel;
- d. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan;
- e. Lainnya

Pada Agustus 2014, sektor perdagangan, rumah makan dan hotel merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu mencapai 28,52 %, diikuti sektor pertanian dengan persentase 24,17 % dan sektor jasa dengan persentase 22,28 %. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yaitu 32, 59 %, sedangkan lapangan usaha industri, perdagangan, rumah makan dan hotel, serta jasa mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja.

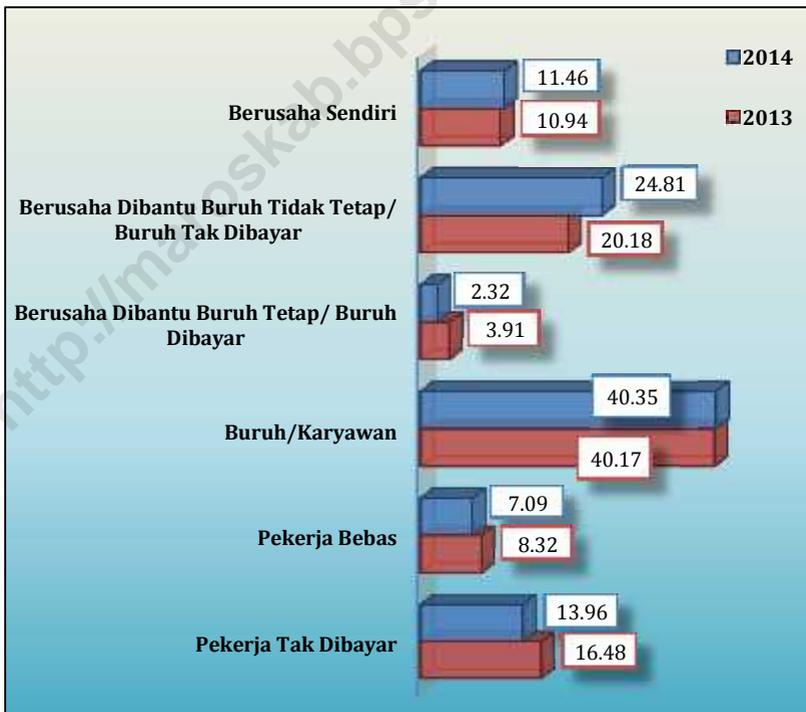
Grafik 6.3. Distribusi Tenaga Kerja (%) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013 dan 2014



6.3. STATUS PEKERJAAN

Indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Di Kabupaten Maros pada tahun 2013 maupun 2014, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar berstatus buruh/karyawan. Pada Agustus 2014 mencapai 40,35 %. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 40,17 %.

Grafik 6.4. Distribusi Tenaga Kerja (%) Menurut Status Pekerjaan Utama, Tahun 2013 dan 2014



BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan salah satu kebutuhan dasar. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup pemiliknya. Rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Sebagai sarana pembinaan keluarga, rumah diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal yaitu tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

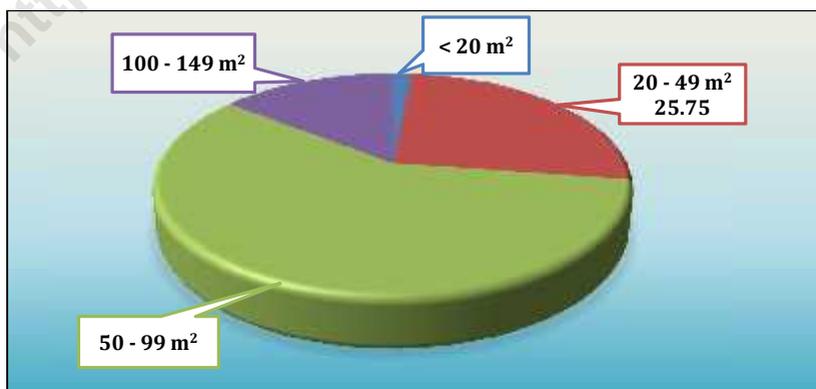
7.1. KUALITAS RUMAH TINGGAL

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah dengan luas lantai rumah sama dengan atau lebih dari luas lantai perkapita (10 m^2)

7.1.1. Luas Lantai

Sebagian besar rumah di Kabupaten Maros telah memiliki lantai yang cukup luas. Sekitar 58,37 % rumah tangga memiliki luas lantai rumah berkisar antara $50 - 99 \text{ m}^2$. Namun, masih terdapat sekitar 1,51 % rumah tangga yang memiliki rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m^2 .

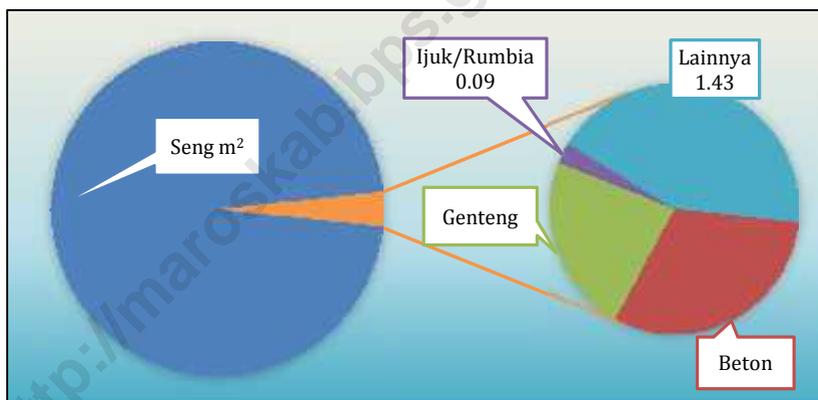
Grafik 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah



7.1.2. Atap Terlulus

Sebagian besar rumah di Kabupaten Maros telah memenuhi standar kualitas dari segi atap yaitu beratapkan seng atau genteng atau sirap atau asbes atau beton. Sekitar 96,67 % rumah tangga telah memiliki rumah yang beratapkan seng, 1,04 % beratapkan beton dan 0,77 % beratapkan genteng. Sedangkan 0,09 % masih beratapkan ijuk/rumbia dan 1,43 % beratapkan lainnya.

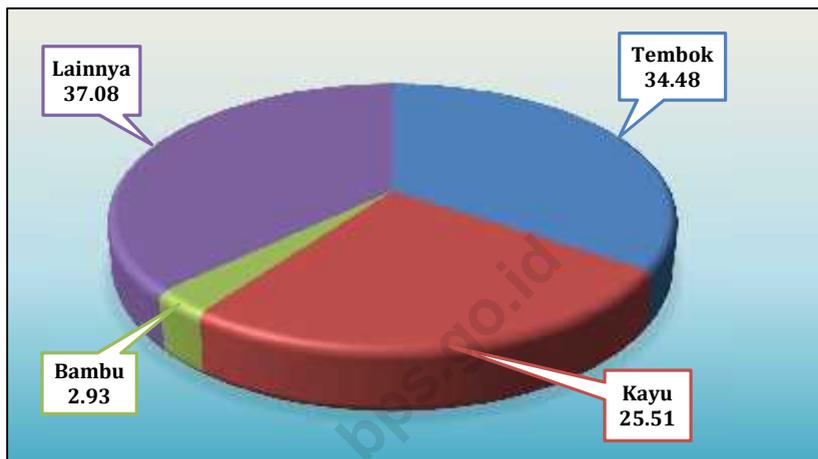
Grafik 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terlulus



7.1.3. Dinding Terlulus

Jika dilihat berdasarkan dinding terlulus, 34,48 % rumah tangga di Kabupaten Maros telah memiliki rumah berdinding tembok dan 25,51 % berdinding kayu. Namun rumah berdinding lainnya seperti seng memiliki persentase tertinggi yaitu mencapai 37,08 %, serta masih terdapat 2,93 % yang memiliki rumah berdinding bambu.

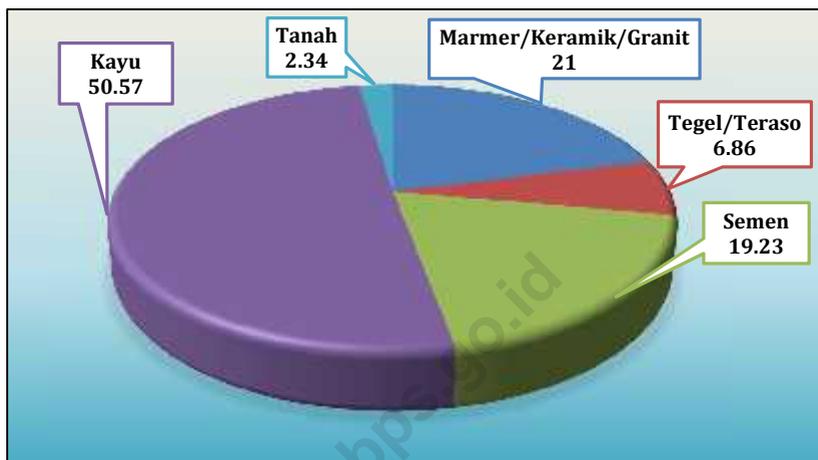
Grafik 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas



7.1.4. Lantai Terluas

Jika dilihat berdasarkan jenis lantai terluas, 97,66 % rumah tangga di Kabupaten Maros telah memenuhi standar kualitas rumah yaitu memiliki lantai bukan tanah. Sebagian besar merupakan rumah panggung yang berlantai kayu/papan yaitu dengan persentase 50,57. Sedangkan 21 % rumah telah berlantai marmer/keramik/granit dan 19,23 % telah berlantai semen. Namun masih terdapat sekitar 2,34 % rumah yang berlantai tanah.

Grafik 7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas



7.2. FASILITAS RUMAH TINGGAL

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik.

7.2.1. Sumber Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan dan Sumber Air

Penggunaan	Sumber Air					
	Air dalam kemasan	Air isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/ Pompa	Sumur terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Minum	0,79	35,99	3,07	0,54	10,23	20,09
Memasak	0	3,98	11,57	0,84	21,69	28,6
Mandi/Cuci	0	0	10,77	0,36	24,98	33,31

Penggunaan	Sumber Air					
	Sumur tak terlindung	Mata air terlindung	Mata air tidak terlindung	Air sungai	Air hujan	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Minum	3,49	9,37	3,34	1,65	11,06	0,37
Memasak	3,89	12,44	3,91	1,78	10,69	0
Mandi/Cuci	6,96	10,45	3,62	4,41	4,98	0,16

Pada tahun 2014, hanya sekitar 40,39 % rumah tangga di Kabupaten Maros yang telah menggunakan air minum bersih yaitu yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang dan leding. Sedangkan 59,61 % masih menggunakan air yang berasal dari sumur, mata air, sungai maupun air hujan. Sedangkan untuk keperluan masak sebagian besar rumah tangga memanfaatkan air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan dengan persentase masing-

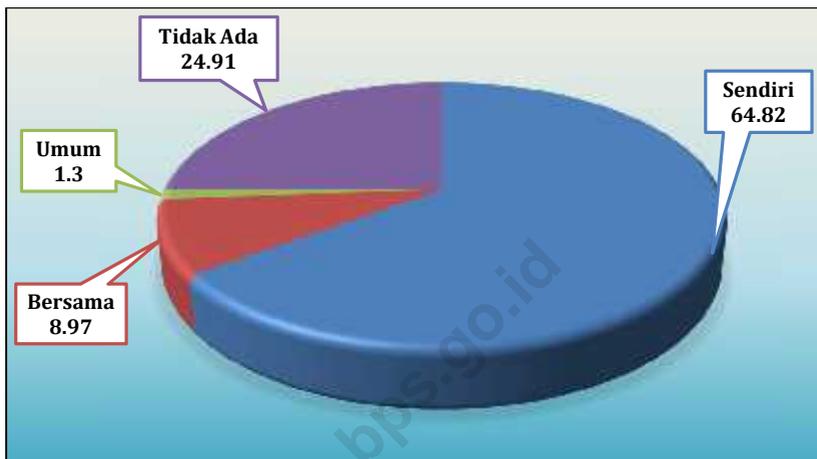
masing yaitu sekitar 11,57 %, 21,69 %, 28,6 %, 12,44 % dan 10,69 %. Namun masih terdapat sekitar 7,8 % rumah tangga yang masih menggunakan air yang berasal dari sumur tak terlindung dan mata air tak terlindung untuk keperluan memasak. Sama halnya untuk keperluan mandi/cuci, sebagian besar rumah tangga menggunakan air yang berasal dari sumur terlindung dan sumur bor yaitu sekitar 33,31 % dan 24,98 %.

7.2.2. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

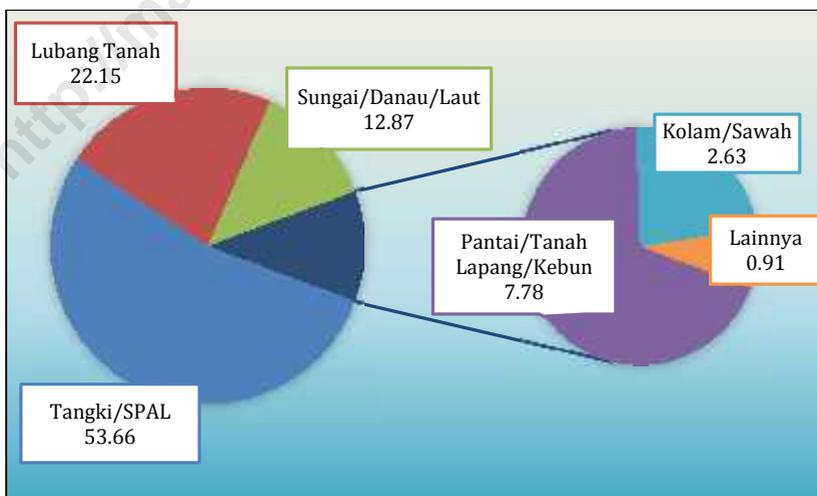
Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air serta menyebabkan berbagai macam penyakit. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Maros telah menggunakan jamban sebagai fasilitas tempat buang air besar, di antaranya sekitar 64,82 % telah memiliki fasilitas jamban sendiri, sekitar 8,97 % menggunakan jamban secara bersama dan 1,3 % menggunakan jamban umum. Sedangkan sekitar 24,91 % rumah tangga lainnya tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar.

Grafik 7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar



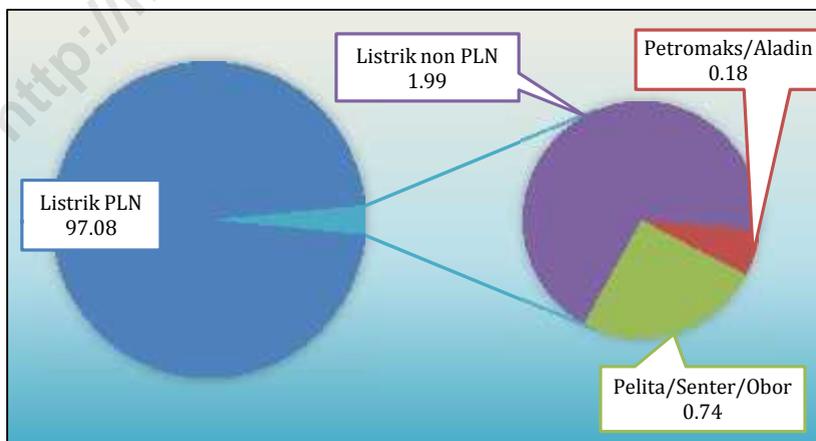
Grafik 7.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Tinja



Disamping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2014 rumah tangga di Kabupaten Maros yang menggunakan jamban dengan tangki septik telah mencapai 53,66 %.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Fasilitas listrik baik PLN maupun non PLN telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Kabupaten Maros. Hal ini berbanding lurus dengan persentase 99,07 % rumah tangga di Kabupaten Maros yang telah menikmati fasilitas listrik tersebut. Sekitar 97,08 % di antaranya merupakan listrik PLN.

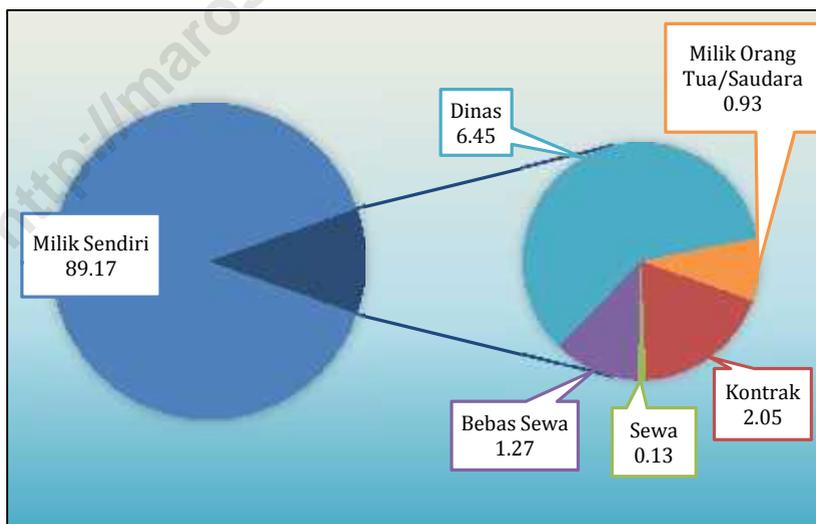
Grafik 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan



7.3. STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.

Grafik 7.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal



Pada tahun 2014, jumlah rumah tangga di Kabupaten Maros yang menempati rumah milik sendiri sekitar 89,17 %, selebihnya 10,83 % menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 2,05 % rumah kontrakan, 0,13 % rumah sewa, 1,27 % rumah bebas sewa, 6,45 % rumah dinas dan 0,93 % rumah milik orang tua/sanak saudara.

<http://maroskab.bps.go.id>

BAB VIII

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Besar kecilnya persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan persentase pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil persentase pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga cenderung semakin sejahtera jika persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

8.1. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung semakin tinggi pengeluaran untuk non makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya telah mencapai titik jenuh, sehingga

peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran konsumsi dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Grafik 8.1. Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Maros, Tahun 2013 dan 2014



Selama periode 2013 – 2014, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Maros meningkat dari Rp.643.079,- menjadi Rp.721.191,-. Rata-rata pengeluaran untuk makanan meningkat dari Rp.348.322,- per kapita sebulan pada tahun 2013 menjadi Rp.373.781,- per kapira sebulan di tahun 2014. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan meningkat dari Rp.294.757,- per kapita sebulan pada tahun 2013 menjadi Rp.347.410,- per kapita sebulan di tahun 2014.

8.2. POLA KONSUMSI

Bila dilihat dari pola konsumsinya, persentasenya pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 54,16 % pada tahun 2013 menjadi 51,83 % di tahun 2014. Sebaliknya, pengeluaran non makanan meningkat dari 45,84 % menjadi 48,17 %. Peningkatan pendapatan rumah tangga yang terjadi, dibelanjakan untuk barang non makanan Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Maros.

Grafik 8.2. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Maros, Tahun 2013 dan 2014

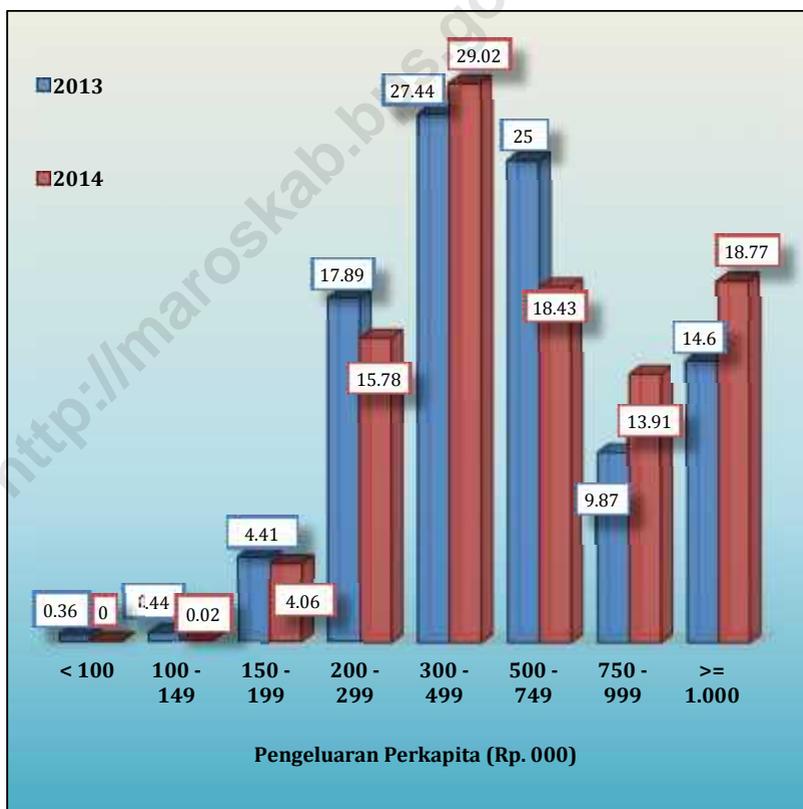


Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan perhitungan distribusi pendapatan menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

8.3. DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT PENGELUARAN

Grafik 8.3. Persentase Penduduk Kabupaten Maros Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita, Tahun 2013 dan 2014



Distribusi penduduk Kabupaten Maros semakin menurun pada golongan pengeluaran menengah ke bawah, sebaliknya hampir pada semua golongan pengeluaran menengah ke atas terjadi kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan penduduk.

Dengan meningkatnya pengeluaran per kapita, adanya peningkatan pendapatan dan menurunnya presentase pengeluaran non makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2013 - 2014 terjadi peningkatan kesejahteraan.

<http://maroskab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAROS

Jl Jendral Sudirman, Kab Maros

Telp / Fax. (0411) 3875505,

Home page: www.maroskab.bps.go.id

Email: bps7308@bps.go.id,